

BAB III
GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KEGIATAN INDUSTRI
DI KECAMATAN CIPEUNDEUY
KABUPATEN SUBANG

Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum dari Kabupaten Subang dan Kecamatan Cipeundeuy yang meliputi; aspek kebijakan (seperti: kebijakan pembangunan Propinsi Jawa Barat dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Subang), gambaran umum Kecamatan Cipeundeuy (meliputi: kondisi aspek fisik dan topografi, aspek geologi dan jenis tanah, kondisi penduduk, kondisi aspek ekonomi, kondisi sarana prasarana dan kondisi industri.

3.1 Aspek Kebijakan

3.1.1 Kebijakan Pembangunan Propinsi Jawa Barat

Dalam menciptakan kondisi terlaksananya tata ruang dan pembangunan wilayah lebih baik, maka diperlukan adanya kebijakan pembangunan. Adapun kebijakan pembangunan Propinsi Jawa Barat dituangkan dalam Visi pembangunan Propinsi Jawa Barat yang ingin dicapai yaitu *“Propinsi Jawa Barat Dengan Atribisnis Yang Terdepan Di Indonesia”*. Dalam upaya mencapai visi tersebut diperlukan kejelasan misi sebagai acuan keterpaduan fungsi-fungsi manajemen pembangunan dengan cakupan sasaran sebagai berikut (Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Propinsi Jawa Barat):

- a. Terbenahi dan tersiapkannya pelaksanaan pembangunan yang berpihak terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat, serta mengurangi kesenjangan desa dan kota dengan lebih menekankan pemberdayaan sektor agraris dan perdesaan sebagai penyeimbang sektor industri dan perkotaan.
- b. Terbenahnya kondisi akibat hubungan dampak krisis untuk kembali dalam kondisi normal pada setiap sektor pembangunan guna menghadapi tantangan pembangunan pada masa datang.

- c. Terbenahi dan tersiapkannya pelaksanaan pembangunan yang dapat memecahkan masalah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan serta mempertahankan kawasan wilayah pendukung hidrologis sesuai dengan fungsi yang diharapkan, penyiapan infrastruktur fisik yang mendukung pertumbuhan wilayah yang lebih merata, pengamanan dan pengelolaan fungsi strategis aset wilayah pendukung pembangunan makro serta penanganan konflik masa depan pada batas-batas wilayah.
- d. Terbenahi dan tersiapkannya pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tatanan baru otonomi daerah dalam hal pemenuhan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan dan kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan tuntutan masyarakat dan mendukung kerja sama antara pemerintah daerah propinsi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah kota dan kabupaten.
- e. Terbenahi dan tersiapkannya pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tatanan baru otonomi daerah dalam hal undang-undang perimbangan keuangan terkait dengan tetap terjaganya sumber pendanaan pembangunan, menghindari konflik kewenangan pusat dan daerah dalam peningkatan sumber pendapatan serta upaya persiapan ketata-laksanaan manajemen pendukungnya secara lebih efektif, efisien, dan transparan.
- f. Terbenahi dan tersiapkannya pelaksanaan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, melibatkan partisipasi masyarakat, dan lembaga-lembaga non pemerintahan dalam perumusan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring pembangunan pada berbagai sektor pembangunan.

Atas dasar upaya-upaya pembenahan sesuai dengan lingkup kewenangan Propinsi berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah, maka misi pembangunan Propinsi Jawa Barat, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Penataan dan Pemantapan Pembangunan Agribisnis adalah langkah untuk mengoptimalkan kemampuan sektor pertanian baik dalam kuantitas maupun kualitas produksi supaya mempunyai nilai tambah tinggi dan diminati oleh masyarakat sebagai usaha yang mampu memberikan keuntungan tinggi serta mampu bersaing dalam perdagangan nasional maupun internasional.
- b. Pengembangan Agroindustri di Kawasan Andalan adalah langkah untuk mempertahankan kondisi lingkungan yang seimbang dan meningkatkan nilai tambah pertanian melalui kegiatan industri yang mengolah hasil pertanian. Ditetapkannya kawasan andalan sebagai pusat pengembangan agroindustri adalah agar terkonsentrasinya sebuah kegiatan sesuai keunggulan masing-masing kawasan untuk tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan, sehingga mampu menjual produk dengan harga yang dapat bersaing.
- c. Penataan dan Peningkatan Perdagangan dalam Negeri dan Luar Negeri, adalah langkah untuk membangun masyarakat agraris yang berperilaku bisnis dengan mempersiapkan informasi dan produk-produk pertanian serta olahan hasil pertanian agar mampu bersaing dalam perdagangan nasional (terdepan di Indonesia) dan pasar global.
- d. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan IPTEK dalam Keterkaitan Ekonomi Kerakyatan, adalah langkah untuk mendayagunakan seluruh faktor produksi, khususnya masyarakat Jawa Barat melalui pemanfaatan IPTEK sehingga mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan pembangunan.
- e. Mendorong Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah, melalui peningkatan kebijaksanaan yang mengatur penataan kelembagaan masyarakat, terutama yang terlibat langsung pada pelayanan publik dan usaha ekonomi kerakyatan di tingkat Kabupaten / Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

Arah kebijaksanaan pembangunan Propinsi Jawa Barat ditujukan dalam upaya pencapaian target visi dan misi yang telah ditetapkan melalui pemantapan aspek politik dan pemerintahan sebagai bagian penting dalam membentuk sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), peningkatan infrastruktur wilayah yang semakin mantap guna mendukung mobilitas pergerakan barang dan orang serta ketersediaan sumber daya alam dan buatan, menjaga kelestarian alam dan keberlanjutan pembangunan melalui prinsip pendekatan pembangunan yang berbasiskan daya dukung alam.

Dalam rangka efektivitas pencapaian visi dan misi dilakukan melalui pendekatan wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Barat melalui pengembangan 8 (delapan) kawasan andalan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan yang berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta pendekatan sektoral melalui pengembangan 6 (enam) bisnis andalan pembangunan, yaitu agribisnis, industri manufaktur, industri jasa, bisnis kelautan, bisnis pariwisata, dan pengembangan sumber daya manusia. Salah satunya adalah Kebijakan tentang Kawasan Andalan Purwasuka (Purwakarta, Subang, Karawang)

Prioritas pengembangan kawasan andalan diarahkan pada beberapa kawasan lainnya yang belum diprioritaskan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu Kawasan Andalan Bopunjur, Bodebek, Kawasan Andalan Sukabumi, Priangan Timur, Ciayumajakuning dan Cekungan Bandung. Selain itu, pengembangan pusat-pusat pelayanan berupa pusat-pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah andalan. Prioritas pengembangan sektoral melalui pendekatan 6 (enam) bisnis andalan dilakukan untuk semua bisnis andalan tersebut dengan porsi pembiayaan yang lebih besar pada jenis yang baru, yaitu bisnis kelautan, pariwisata, dan agribisnis.

3.1.2 Kebijakan Pembangunan Kabupaten Subang Terhadap Industri di Kecamatan Cipeundeuy

Dalam Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Subang di dasarkan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Subang yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Subang, di jelaskan bahwa:

Visi Kabupaten Subang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda No. 6 tahun 2004 tentang Program Pembangunan Daerah tahun 2005-2009), yaitu: "Terwujudnya Kabupaten Subang sebagai Daerah Agribisnis, Pariwisata, dan Industri yang Berwawasan Lingkungan dan Religius serta berbudaya melalui Pembangunan berbasis Gotong Royong".

Sedangkan Misi Kabupaten Subang merupakan penjabaran dari visi, yaitu;

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, berakhlak, berbudaya, produktif, mandiri, maju dan berdaya saing.
2. Memanfaatkan dan mengembangkan potensi agribisnis, pariwisata, industri dan sumber daya alam spesifik lokalita yang berwawasan lingkungan, berdaya saing dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan aparatur yang profesional, berdaya guna dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
4. Membuka peluang sebesar-besarnya sebagai daerah yang menarik untuk investasi.
5. Meningkatkan pola kemitraan, gotong royong dan keterpaduan antara pelaku pembangunan guna mewujudkan subang sebagai daerah agribisnis, pariwisata dan industri.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Subang tahun 2002-2012 yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004. dimana rencana pengembangan wilayah Kabupaten Subang mencakup rencana struktur dan pemanfaatan ruang, seperti yang diuraikan pada **tabel 3.1**

Tabel 3.1
Rencana Pengembangan Wilayah Kabupaten Subang
Berdasarkan RTRW Kabupaten Subang 2002 - 2012

No	Rencana Pengembangan	Kebijakan Pengembangan	Lokasi Pengembangan
1	Kawasan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan fungsi dan luas kawasan hutan lindung yang telah ada. • Mengalihfungsikan kawasan hutan lindung produksi yang ada menjadi hutan lindung. 	Lokasi tersebar diseluruh kabupaten

No	Rencana Pengembangan	Kebijakan Pengembangan	Lokasi Pengembangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan fungsi hidrologis kawasan lindung diluar kawasan hutan, yakni: kawasan resapan air, sekitar situ/waduk, terbuka hijau kota, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan bencana, perlindungan plasma nutfah dan kawasan perkebunan yang masuk dalam kriteria skor (>125). • Bagi kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung yang ditetapkan dapat diteruskan sejauh ini tidak mengganggu fungsi perlindungan. • Kegiatan budidaya yang mengganggu atau terpaksa mengkonversi kawasan berfungsi lindung, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986, maka harus dikembalikan fungsinya semula sebagai kawasan lindung. • Kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung harus dicegah perkembangannya. 	
2	Kawasan Budidaya Lahan Basah	<ul style="list-style-type: none"> • Intensifikasi lahan pertanian terutama pada wilayah-wilayah potensial pengembangan pertanian lahan basah. • Mempertahankan luas areal pertanian yang ada 172.017 Ha khususnya areal 	
		<p>Sawah yang telah memiliki irigasi teknis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perluasan area persawahan, yaitu meningkatkan produktivitas baik melalui pompanisasi maupun pembuatan cekdam/bendungan baru. • Pengembangan prasarana pengairan untuk mendukung pengembangan padi sawah. • Penyelesaian tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lainnya pada suatu kawasan/lokasi. • Meningkatkan dukungan pengembangan usaha bagi petani baik menyangkut keterampilan, modal dan pemasaran. 	
3	Kawasan Budidaya Perkebunan dan Kebun Campuran	<ul style="list-style-type: none"> • Intensifikasi dan lahan pekebunan terutama pada wilayah-wilayah potensial • Pengembangan perkebunan dan kebun campuran. • Pengembangan lahan perkebunan sesuai dengan potensi dan kesesuaian lahannya. • Meningkatkan dukungan pengembangan usaha bagi petani ikan baik menyangkut keterampilan maupun modal dan pemasaran. 	Sagalaherang, Serangpanjang, Kasomalang Cisalak, Tanjungsiang, Cijambe, Cibogo, Subang, Kalijati, Cipeundeuy, Pabuaran, Patokbeusi, Purwadadi, Cikaum dan Cipunagara.
4	Kawasan Budidaya Perikanan (Tambak dan Kolam)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kegiatan perikanan (tambak dan kolam) pada kawasan potensial pengembangan. • Meningkatkan dukungan pengembangan usaha bagi petani ikan baik menyangkut keterampilan maupun modal. • Meningkatkan dukungan pemasaran bagi 	Sagalaherang, Cisalak, Pamanukan, Blanakan, Subang, Kalijati, Pagaden Legonkulon, Binong, Patokbeusi, Pusakanagara, Jalancagak, Cisalak,

No	Rencana Pengembangan	Kebijakan Pengembangan	Lokasi Pengembangan
		petani dengan penyediaan sarana dan jaringan pemasaran.	Tanjungsiang.
5	Kawasan Budidaya Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengembangan industri dan perusahaan peternakan. • Meningkatkan pengembangan peternakan rakyat. • Meningkatkan dukungan usaha bagi peternak baik menyangkut keterampilan, modal dan pemasaran. 	Cibogo, Cipunagara, Pagaden, Kalijati, Cipeundeuy, Pabuaran, Purwadadi, Cikaum, Cijambe, Tanjungsiang, Sagalaherang, Ciasem, Jalancagak dan Cisalak.
6	Kawasan Hutan Produksi	Pengembangan Kawasan Hutan produksi	Sagalaherang, Serangpanjang, Jalancagak, Kasomalang, Tanjungsiang, dan Cisalak.
7	Kawasan Permukiman Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kegiatan permukiman (terutama Pantura) diarahkan pada intensifikasi pusat-pusat permukiman yang telah ada (konsentris dan bukan memita) atau pusat-pusat baru (tidak ada disepanjang jalur regional). • Penyediaan sarana (perekonomian, pendidikan, kesehatan, peribadatan) dan prasarana penunjang (air bersih, limbah, drainase, jalan lokal, dan lain-lain) dalam mendukung pengembangan kegiatan permukiman (Pantura). • Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota pada kawasan yang menunjukkan kecenderungan perkembangan pesat serta ibu kota kecamatan. • Pengembangan permukiman untuk mendukung perkembangan zona industri industri di Kecamatan Cipeundeuy, Pabuaran, Kalijati, Purwadadi, Cibogo dan Cipunagara. • Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana permukiman pada ibukota-ibukota kecamatan. 	Ibukota kecamatan dan kota-kota.
8	a. Kawasan Peruntukan Zona Industri.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengarahkan perkembangan industri secara umum pada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona industri. • Penyediaan lahan untuk mendukung perkembangan zona industri. • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan berupa : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Perumahan dan sarana sosial ekonomi (perekonomian, kesehatan, peribadatan, transportasi, rekreasi). ➢ Prasarana penunjang berupa: jalan, drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, air limbah, ruang terbuka dan jalur hijau. 	Pabuaran, Cipeundeuy , Kalijati, Purwadadi, Cibogo, Pagaden dan Cipunagara
	b. Kawasan Peruntukan Non Industri (Non Zona	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kegiatan Industri pada arahan lokasi pengembangan. • Mengarahkan pengembangan industri polutif berada jauh dari kawasan permukiman dan 	Jalancagak, Cisalak, Sagalaherang, Kalijati, Patokbeusi dan Ciasem.

No	Rencana Pengembangan	Kebijakan Pengembangan	Lokasi Pengembangan
	Industri).	<p>perkotaan, sehingga mengurangi dampak lingkungan bagi kegiatan lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meberikan dukungan usaha kegiatan industri terutama modal. 	
9	Kawasan Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kegiatan perkembangan yang ramah lingkungan. • Reklamasi penambangan Galian C 	Cijambe, Kalijati, Pagaden, Cipunagara, Purwadadi, Patokbeusi, Cipeundeuy, Subang, Cikaum, Binong, Pamanukan, Ciasem, dan Cisalak.
10	Sistem Kota-kota	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan keterkaitan antar wilayah. • Penyediaan sarana perkotaan sesuai dengan fungsi kota. • Peningkatan peran serta investasi swasta. • Pengembangan kegiatan ekonomi kota. • Penataan ruang kota. 	Ibu Kota Kecamatan se-Kabupaten Subang
11	Kawasan Wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan ruang terutama untuk kawasan pariwisata terpadu. • Pengembangan objek/atraksi wisata/rekreasi. • Pengembangan sarana dan prasarana penunjang. 	Objek wisata Pantai Blanakan (Kec. Blanakan); Objek Wisata Pondok Bali (Kec. Legonkulon); Objek Wisata Alam (Ciater dan Gunung Tangkuban Perahu) di Kecamatan Jalancagak/Ciater; objek wisata pada desa-desa, seperti Desa Wisata Wangunreja, Desa Wisata Bunihayu (Kec. Jalancagak), Desa Ponggang dan Desa Cipancar (Kec. Sagalaherang), Desa Mayang dan Desa Cupunagara (Kec. Cisalak), Desa Patimban (Kec. Pusakanagara).
12	a. Prasarana Transportasi Darat.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kondisi jalan. • Peningkatan jalan alternatif. 	Tersebar pada wilayah kabupaten.
	b. Prasarana Transportasi Udara.	Peningkatan pelayanan bandara melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang.	Bandara Surya Dharma Kalijati.

Sumber : RTRW Kabupaten Subang Tahun 2002-2012 (Perda No. 2 Tahun 2004)

3.2 Gambaran Umum Kecamatan Cipeundeuy

3.2.1 Kondisi Fisik dan Topografi

Kecamatan Cipeundeuy secara geografis merupakan wilayah yang berada dibagian barat Ibu Kota Kabupaten Subang dengan luas wilayah 98,06 Km². Terdiri dari 7 (tujuh) desa dengan batas wilayah, sebagai berikut: **(lihat tabel 3.2)**

- Sebelah Utara : Kecamatan Pabuaran dan Purwadadi
- Sebelah Barat : Kabupaten Purwakarta
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sagalaherang
- Sebelah Timur : Kecamatan Kalijati

Tabel 3.2
Luas Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang
Berdasarkan Desa

No	Desa	Luas Wilayah (Km ²)
1	Banggalamulya	15,88
2	Jalupang	17,29
3	Cimayasari	10,03
4	Lengkong	17,19
5	Cipeundeuy	12,43
6	Wantilan	13,26
7	Sawangan	11,98
Jumlah		98,06

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, 2008 (BPS Subang)

Dari luas wilayah yang ada, Kecamatan Cipeundeuy memiliki beberapa daya dukung yang sangat potensial untuk dikembangkan, antara lain kondisi topografi, curah hujan, hidrologi, jenis tanah.

A. Kondisi Topografi

Ditinjau dari kondisi fisik topografi Kecamatan Cipeundeuy relatif datar dengan kemiringan 0-5 %. kondisi ini sangat potensial untuk pengembangan kegiatan pembangunan khususnya kegiatan industri, hal ini dikarenakan penilaian kondisi topografi akan sangat memudahkan dalam menentukan potensi atau tidaknya suatu

rencana pembangunan diatas lahan tersebut. Selain itu, topografi Kecamatan Cipeundeuy juga merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian 30 ó 50 meter diatas permukaan laut (mdpl).

B. Kondisi Curah Hujan

Curah hujan pada tahun terakhir di Kecamatan Cipeundeuy sebesar 952 mm/bulan, dengan jumlah hari hujan sebanyak 129 hari hujan. Curah hujan bulanan tertinggi sekitar 362 ó 487 berkisar antara bulan November sampai bulan April.

C. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kecamatan Cipeundeuy umumnya cukup baik, hal ini terlihat dari sebagian besar penduduk di wilayah ini menggunakan sumber air tanah (sumur bor) dan sumber air PDAM. Wilayah ini dibatasi oleh sungai besar, yaitu sungai Cipeundeuy dengan debit yang cukup banyak dan apabila musim kemarau sungai tersebut tidak kering. Selain itu, sungai ini merupakan batas wilayah antara Kecamatan Cipeundeuy dengan Kabupaten Purwakarta.

D. Kondisi Jenis Tanah

Ditinjau dari kondisi jenis tanah di Kecamatan Cipeundeuy, bahwa pembentukan tanah merupakan suatu proses perubahan bentuk suatu bahan menjadi bahan lain yang bersifat jauh berbeda dengan bahan asalnya dan ditentukan oleh faktor bahan induk, iklim, bakteri, mikrofauna dan berbagai macam serangga didalam tanah. Penyebaran jenis tanah berkaitan erat dengan keadaan bentuk tanah. Jenis tanah yang ada di Kecamatan Cipeundeuy, terdiri dari:

1. Podsolik merah kekuningan, terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Cipeundeuy.
2. Latosol ó andosol disebagian besar wilayah kecamatan.

3.2.2 Kondisi Kependudukan

Ditinjau dari kondisi kependudukan di Kecamatan Cipeundeuy sampai tahun 2008 sebesar 41.925 jiwa. Lihat **tabel 3.3**

Tabel 3.3
Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Kecamatan Cipeundeuy
Tahun 1999 – 2008

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Jiwa/Km ²
1	1999	48.114	490
2	2000	48.775	497
3	2001	49.556	505
4	2002	50.347	513
5	2003	51.135	521
6	2004	56.682	578
7	2005	54.585	556
8	2006	41.356	421
9	2007	40.450	412
10	2008	41.925	427

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Subang

Sedangkan ditinjau dari jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan/mata pencaharian pada tahun 2008, diklasifikasikan kedalam 5 (lima) kelompok jenis pekerjaa. **Lihat tabel 3.4**

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Yang Bekerja
Di Kecamatan Cipeundeuy
Tahun 2008

No	Desa	Penduduk Di Industri	Penduduk Non Industri
1	Cimayasari	178	145
2	Cipeundeuy	3.132	3235
3	Karangmukti	111	109
4	Kosar	134	132
5	Lengkong	379	346
6	Sawangan	148	128
7	Wantilan	2.667	2671
JUMLAH		6.749	6.766

Sumber : Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Subang

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penduduk di Kecamatan Cipeundeuy sebagian besar masih bermata pencaharian sebagai petani, akan tetapi penduduk yang

bekerja disektor industri juga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap wilayah tersebut.

3.2.3 Kondisi Sarana Umum dan Sosial

Dari kondisi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Kecamatan Cipeundeuy menurut data profil kecamatan tahun 2008, ditinjau dari segi kuantitas fasilitas yang terdapat di wilayah kecamatan ini sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari fasilitas kegiatan ekonomi di kecamatan ini, yang mana terdapat 1 unit Bank, 2 unit ATM, 8 unit koperasi simpan pinjam, 4 unit koperasi unit desa, 1 buah pasar tradisional, 2 buah pasar mini modern. Dalam bidang sarana pendidikan di Kecamatan Cipeundeuy terdapat 38 buah sekolah dari berbagai jenjang pendidika, yang mana TK sebanyak 6 buah, SD sebanyak 26 buah, SLTP 4 buah, SLTA 1. Untuk sarana kesehatan terdapat puskesmas 1 buah, puskesmas pembantu sebanyak 2 buah, balai kesehatan sebanyak 11 buah, balai bersalin sebanyak 8 buah. Untuk sarana peribadatan terdapat mesjid sebanyak 132 buah. Dapat dilihat pada **tabel 3.5, tabel 3.6, tabel 3.7 dan tabel 3.8.**

Tabel 3.5
Kondisi Sarana Perekonomian Kecamatan Cipeundeuy

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Pasar Tradisional	1
2	Pasar mini modern (mini market)	2
3	Koperasi simpan pinjam	2
4	Koperasi unit desa	4
5	Bank	1
6	ATM	2
Jumlah		12

Sumber : Data Profil Kecamatan Cipeundeuy, 2008

Tabel 3.6
Kondisi Sarana Pendidikan Kecamatan Cipeundeuy

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	TK	6
2	SD	26
3	SLTP	4
4	SLTA	1
Jumlah		37

Sumber : Data Profil Kecamatan Cipeundeuy, 2008

Tabel 3.7
Kondisi Sarana Kesehatan Kecamatan Cipeundeuy

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Puskesmas Pembantu	2
3	Balai/Klinik Kesehatan	11
4	Balai/klinik Bersalin (Ibu dan anak)	8
Jumlah		13

Sumber : Data Profil Kecamatan Cipeundeuy, 2008

Tabel 3.8
Kondisi Sarana Peribadatan Kecamatan Cipeundeuy

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Mesjid	132
Jumlah		132

Sumber : Data Profil Kecamatan Cipeundeuy, 2008

Dari hasil observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kesemua fasilitas tersebut memiliki tingkat keterawatan yang baik, yaitu berkisar 75% - 100 % apabila ditinjau dari kondisi bangunan, kebersihan sarana, kerapihan dan keteraturan bangunan.

3.2.4 Kondisi Kegiatan Industri Kecamatan Cipeundeuy

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Subang, Kecamatan Cipeundeuy termasuk dalam Zona Industri Kabupaten Subang, yang mana terletak di sebelah barat pusat kota subang dan termasuk dalam Wilayah Pembangunan IV Cipeundeuy dengan fungsi kegiatan sebagai pusat kegiatan industri dan merupakan pusat pertumbuhan di wilayah pembangunan (WP) tersebut.

Dengan ditetapkannya Kecamatan Cipeundeuy sebagai bagian dari zona industri Kabupaten Subang dan sebagai pusat wilayah pembangunan (WP), maka lingkup pelayanan di kecamatan Cipeundeuy saat ini menjadi lebih meningkat dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya. Hal ini didukung oleh lokasi dan aksesibilitas yang baik, hal ini dikarenakan wilayah ini berada pada jalur jalan propinsi dan jalan kabupaten yang mempunyai akses ke Kabupaten Purwakarta. Selain itu, kondisi diatas memberikan konekuensi bahwa semakin tingginya peran dan beban yang di tanggung

Kecamatan Cipeundeuy. Hal ini terlihat dari Kecamatan Cipeundeuy memegang peranan penting sebagai pusat kegiatan pertumbuhan ekonomi dan Kawasan/Zona Industri.

Ditinjau dari kondisi perkembangan perindustrian di Kecamatan Cipeundeuy sampai dengan tahun 2008 berjumlah 12 (sebelas) industri bukan migas yang berskala menengah-besar, dengan melibatkan tenaga kerja sebanyak 6.749 orang tenaga kerja.

Adapun kelompok industri yang berkembang di wilayah ini terdiri dari industri makanan dan minuman, industri tekstil, pakaian jadi dan kulit, industri kertas, industri kimia dan industri barang dari logam, mesin dan peralatannya. Lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut. **Lihat Tabel 3.9**

Tabel 3.9
Daftar Industri Menengah-Besar di Kecamatan Cipeundeuy
Tahun 2008

No	Nama Industri	Alamat Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
1	PT. Kondobo	Desa Cipeundeuy	725
2	PT. Papertech Indonesia	Desa Cipeundeuy	132
3	PT. Benang Sari Indah	Desa Wantilan	800
4	PTPN VII Jalupang	Desa Cipeundeuy	2.268
5	PT. Ado Internasional	Desa Wantilan	119
6	PT. Systech Indonesia	Desa Wantilan	314
7	PT. Ramayana Putra Jaya	Desa Wantilan	203
8	PT. Anugrah Setia Lestari	Desa Wantilan	204
9	PT Hyun Dong Indonesia	Desa Wantilan	972
10	PT. Youtex Garment	Desa Wantilan	605
11	PT. Tri Putra Agung	Desa Wantilan	204
12	PT. Mitra Setia Abadi	Desa Wantilan	203
	Jumlah		6749

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Subang, 2008

Dari beberapa industri yang berkembang, untuk lebih jelasnya kondisi eksisting industri-industri yang ada dengan didukung dengan prasarana dan sarana yang terdapat di Kecamatan Cipeundeuy, hal ini dapat dilihat pada gambar-gambar dokumentasi berikut **lihat gambar 3.1**.

A. Kondisi Eksisting Industri Kecamatan Cipeundeuy

Gambar 3.1
Kondisi Industri-industri Yang Berkembang Di Kecamatan Cipeundeuy



PT. Kondobo Textindo
Lokasi Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy



PT. Youtex
Lokasi Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy



PT. Hyun Dong
Lokasi Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy



PT. Perkebunan Nusantara VIII
Lokasi Desa Jalupang Kecamatan Cipeundeuy



PT. Anugrah Setia Lestri (Kecap Bango)
Lokasi Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy



PT. Systech Indonesia
Lokasi Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy



PT. Ado Internasional
Lokasi Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy



PT. Benang Sari Indonesia
Lokasi Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy

B. Kondisi Jaringan Jalan

Adanya kondisi jaringan jalan yang baik sebagai prasarana penghubung, sehingga dapat mendukung aktivitas kegiatan industri di Kecamatan Cipeundeuy. Adapun kondisi eksisting jaringan jalan yang ada di Kecamatan Cipeundeuy dapat dilihat dari gambar hasil dokumentasi berikut. **Lihat gambar 3.2**

Gambar 3.2

Kondisi Jaringan Jalan di Kecamatan Cipeundeuy



3.3 Gambaran Persepsi Penduduk Terhadap Indikator Kesejahteraan Berdasarkan Hasil Kuesioner

3.3.1 Indikator Tingkat Kemampuan Ekonomi

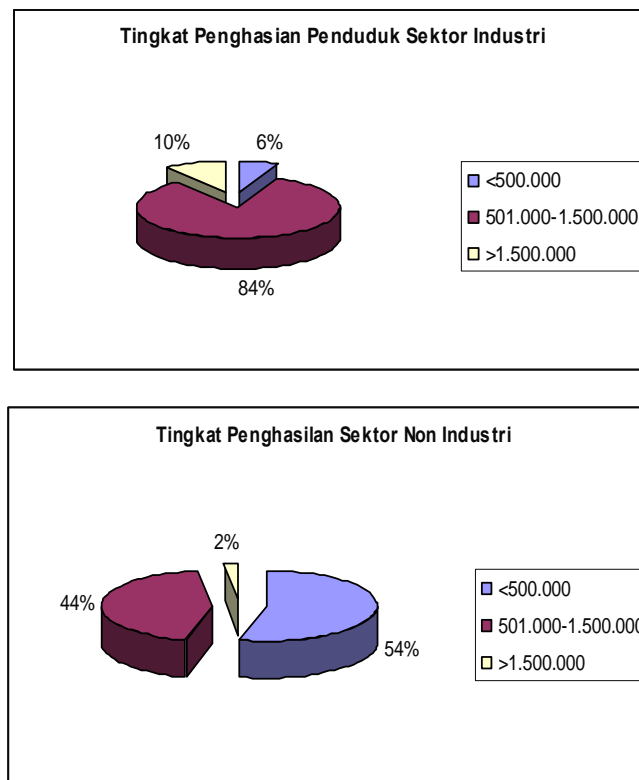
Untuk mengetahui tingkat kemampuan ekonomi penduduk baik yang bekerja disektor industri maupun penduduk yang bekerja disektor non industri dalam penelitian

ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu: tingkat penghasilan, tingkat konsumsi dan tingkat kepemilikan kendaraan pribadi. Adapun data-data yang diperoleh dari data primer.

A. Tingkat Penghasilan

Berdasarkan kondisi tingkat penghasilan penduduk di Kecamatan Cipeundeuy antara penduduk yang bekerja di sektor industri dengan penduduk yang bekerja disektor non industri lebih besar penduduk yang bekerja disektor industri, hal ini terlihat dari perbandingan tingkat penghasilan. **Lihat gambar 3.3**

Gambar 3.3
Perbandingan Tingkat Penghasilan



Sumber : Hasil Kuesioner, 2009

Pada gambar 3.1 terlihat bahwa untuk responden yang bekerja disektor industri sebanyak 42 responden atau 84 % memiliki tingkat tingkat penghasilan antara Rp. 501.000 ó Rp. 1.500.000 per bulan untuk buruh tetap industri (PT. Kondobo Indonesia, PT. Papertech Indonesia, PT. Ado Internasional, PT. Systech Indonesia, PT. Hyundong, PT. Anugrah Setia Lestari, PT. Youtex, PT. Tri Putra Agung, PT. Mitra Setia Abadi,

dan PT. Ramayana Putra jaya) sebanyak 5 responden atau 10 % responden yang memiliki tingkat penghasilan > Rp.1.500.000,- perbulan untuk staf administrasi atau manager industri (seperti; PT. Ado Internasional, PT. Hyundong dan PT. Anugrah Setia Lestari,) dan sebanyak 3 responden atau 6 % memiliki tingkat penghasilan < Rp. 500.000,- perbulan untuk buruh tidak tetap industri (seperti: PTPN Karet Jalupang, PT. Mitra Setia Abadi, dan PT Ramayana Putra Jaya). Sedangkan, untuk responden yang bekerja di sektor non industri sebanyak 27 responden atau 54 % memiliki penghasilan per bulan sebesar <Rp. 500.000,- untuk penduduk yang bekerja sebagai (buruh/kuli angkut, buruh tani, kondektur, pelayan rumah makan, buruh cuci pakaian, pedagang keliling, montir), sebanyak 22 responden atau 44 % memiliki tingkat penghasilan sebesar Rp. 501.000 ó Rp. 1.500.000 perbulan untuk penduduk yang bekerja sebagai (pemilik rumah makan, pedagang elektronik, pedagang sembako, jasa foto copy/percetakan, pegawai Bank Swasta, dan pemilik bengkel kendaraan) sebanyak 1 responden atau hanya 2 % memiliki tingkat penghasilan >Rp. 1.500.000,- perbulan untuk penduduk yang bekerja seperti: dokter praktek. **Lihat tabel 3.10**

Tabel 3.10
Klasifikasi Tingkat Penghasilan Responden
Kecamatan Cipeundeuy

Klasifikasi Jawaban Responden	Tolok Ukur Jawaban Responden
<Rp 500.000	- Cleaning service; - Office boy; - Tukang;
Rp. 501.000-Rp1.500.000	- Karyawan Pabrik; - Staf kantor; - Satuan Pengamanan Kantor (Satpam)
>Rp. 1.500.000	- Staf kantor;

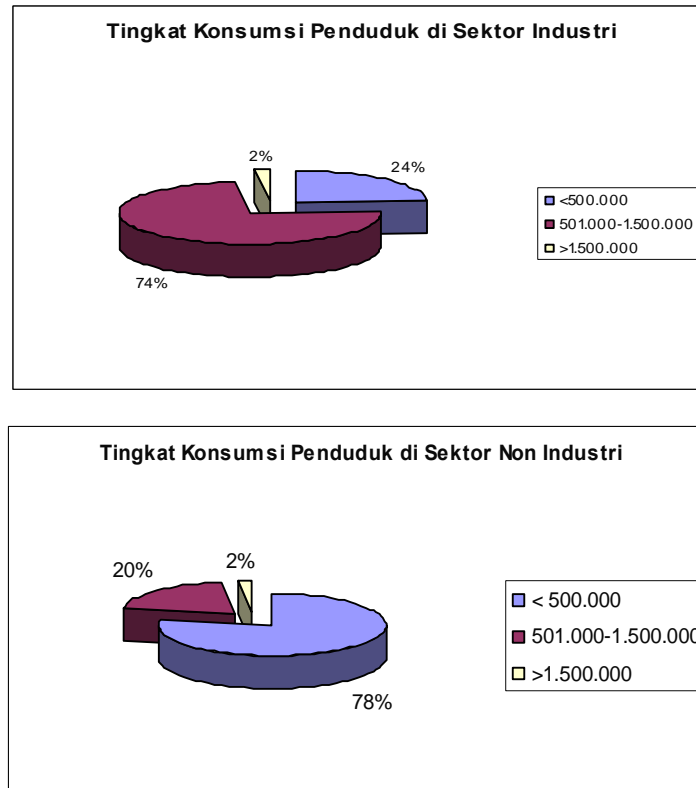
Sumber : Data Hasil Kuesioner, 2009

B. Tingkat Konsumsi

Daya beli penduduk dapat dilihat dari tingkat konsumsinya, maka tingkat konsumsi penduduk akan berbanding lurus dengan tingkat kemampuan ekonominya. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui perbandingan hasil antara responden yang bekerja di sektor industri dengan responden yang bekerja disektor non industri.

Lihat gambar 3.4.

Gambar 3.4
Perbandingan Tingkat Konsumsi



Sumber : Hasil Kuesioner, 2009

Berdasarkan gambar tersebut diperoleh untuk responden yang bekerja di sektor industri sebanyak 12 responden (24%) memiliki tingkat konsumsi sebesar <Rp. 500.000 perbulan adapun konsumsinya (meliputi: makan dan kebutuhan utilitas); sebanyak 37 reponden (74 %) dengan tingkat konsumsi Rp. 501.000-1.500.000 perbulan, adapun konsumsinya meliputi (makan, pakaian, sembako, biaya transportasi) ; dan sebanyak 1 responden (2%) dengan tingkat konsumsi >Rp.1.500.000 perbulan, adapun konsumsinya meliputi: (makan, sembako, BBM, kebutuhan utilitas, biaya pendidikan anak, dan gaji pembantu). Dibandingkan untuk responden yang bekerja disektor non industri sebanyak 39 responden (78%) dengan tingkat konsumsi sebesar <Rp.500.000 perbulan adapun konsumsinya (meliputi: makan; sebanyak 10 responden (20%) dengan tingkat konsumsi Rp.501.000-1.500.000 dan sebanyak 1 responden (2%) dengan tingkat konsumsi >Rp. 1.500.000. **lihat tabel 3.11.**

Tabel 3.11
Klasifikasi Tingkat Konsumsi Responden
Kecamatan Cipeundeuy

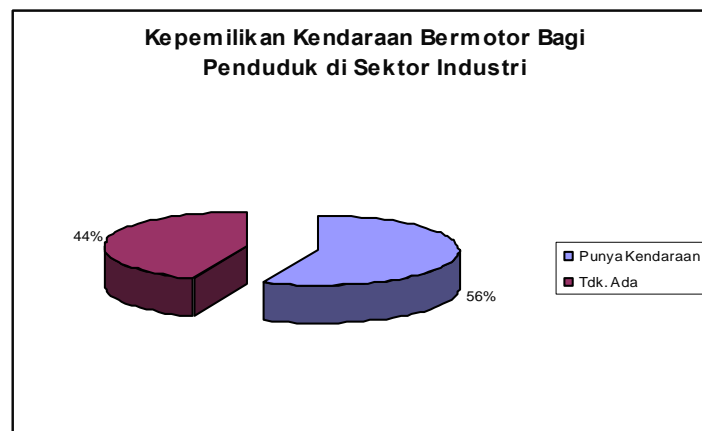
Klasifikasi Jawaban Responden	Tolok Ukur Jawaban Responden
<Rp 500.000	makan dan kebutuhan utilitas
Rp. 501.000- Rp1.500.000	makan, pakaian, sembako, biaya transportasi/BBM
>Rp. 1.500.000	makan, sembako, BBM, kebutuhan utilitas, biaya pendidikan anak dan gaji pembantu)

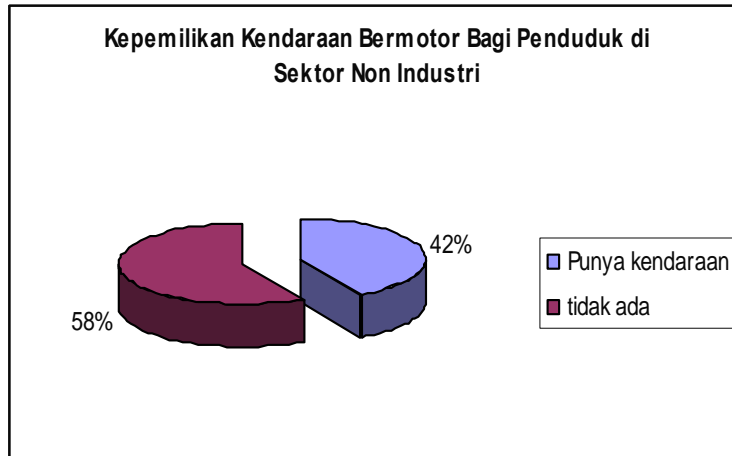
Sumber : Hasil pengolahan kuesioner

C Kemampuan Kepemilikan Kendaraan

Pada indikator kesejahteraan lainnya yang digunakan dalam studi ini adalah kepemilikan kendaraan bermotor, yang mana diketahui bahwa kepemilikan kendaraan bermotor untuk responden yang bekerja disektor industri sebanyak 28 responden (56%) memiliki kendaraan pribadi dan sebanyak 22 responden (44%) tidak memiliki kendaraan bermotor. Sedangkan dibandingkan dengan responden yang bekerja disektor non industri sebanyak 21 responden (42 %) memiliki kendaraan bermotor dan sebanyak 29 responden (58%) masih tidak punya kendaraan bermotor. **Lihat gambar 3.5**

Gambar 3.5
Perbandingan Kemampuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor



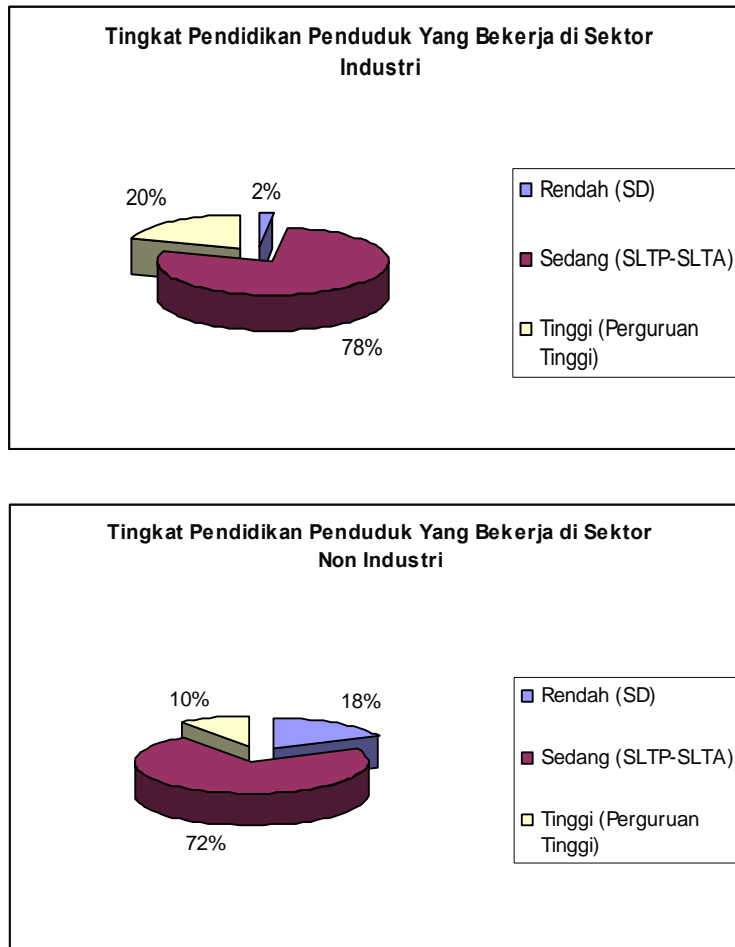


Sumber : Hasil Kuesioner, 2008

3.3.2 Indikator Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator yang perlu diperhatikan, hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin baik pula tingkat pekerjaan yang dihasilkan. Oleh karena itu tingkat pendidikan perlu diutamakan sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27 bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang layak. Dalam hal ini akan diketahui tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Cipeundeuy terutama yang bekerja disektor industri dan sektor non industri dengan didasrkan pada klasifikasi indikator pendidikan rendah, pendidikan sedang dan pendidikan tinggi. **Lihat gambar 3.6.**

Gambar 3.6
Perbandingan Tingkat Pendidikan Penduduk
Kecamatan Cipeundeuy



Sumber: Hasil Kuesioner, 2009

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk yang bekerja disektor industri lebih baik dibandingkan penduduk yang bekerja disektor non industri masih relatif rendah. Dimana untuk penduduk yang bekerja disektor industri sebesar 1 responden (2%) tingkat pendidikannya rendah, sebesar 39 responden atau (39%) tingkat pendidikannya sedang dan sebesar 10 responden atau (20%) tingkat pendidikannya tinggi. Sedangkan untuk penduduk yang bekerja disektor non industri memiliki tingkat pendidikan yang sedikit lebih rendah dibandingkan sektor industri, yang mana sebesar 9 responden (10%) tingkat pendidikannya rendah, sebesar 36

responden atau (72%) tingkat pendidikannya sedang dan sebesar 5 responden dengan tingkat pendidikannya tinggi.

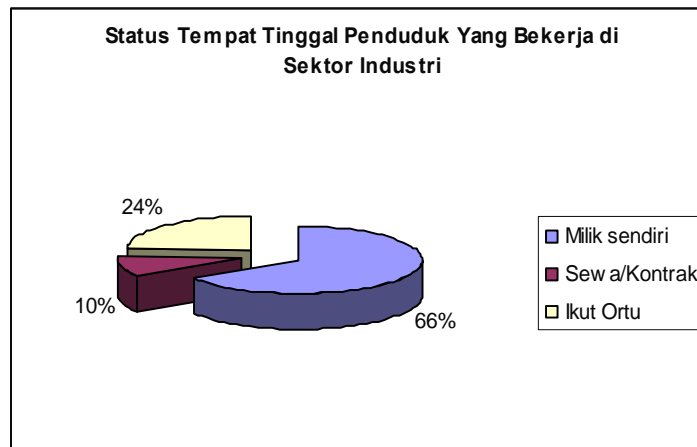
3.3.3 Indikator Kondisi Tempat Tinggal

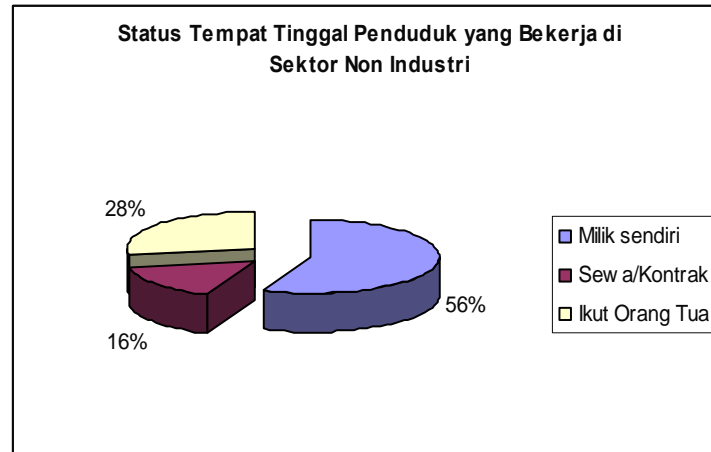
Kondisi tempat tinggal merupakan salah satu indikator dalam melihat tingkat kesejahteraan penduduk, hal ini dikarenakan rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan primer atau mendasar dari manusia. Berdasarkan pemikiran tersebut, akan dianalisis apakah tempat tinggal yang ada sudah cukup layak ditempati. Adapun indikator yang digunakan meliputi: status kepemilikan rumah, jenis dinding rumah, sumber air bersih dan sumber penerangan.

A. Status Tempat Tinggal

Dalam hal ini dapat diketahui perbandingan status tempat tinggal antara penduduk yang bekerja disektor industri dengan penduduk yang bekerja disektor non industri. **Lihat gambar 3.7.**

Gambar 3.7
Perbandingan Status Tempat Tinggal Penduduk Yang Bekerja
di Sektor Industri dan Sektor Non Industri





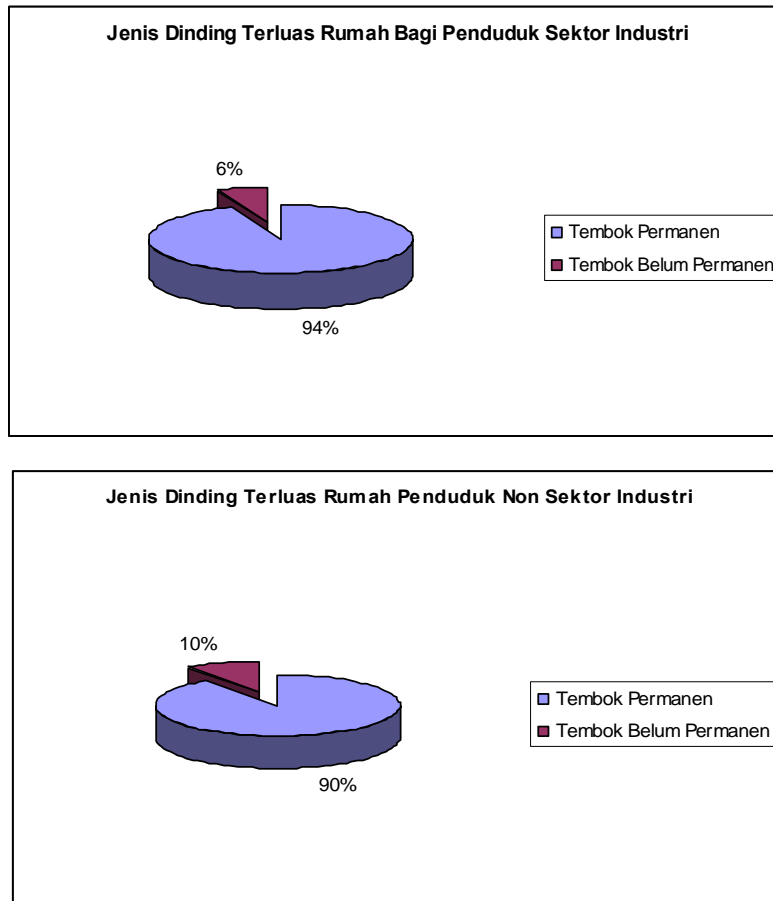
Sumber : Hasil Kuesioner, 2009

Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa responden yang bekerja disektor industri sebanyak 33 responden (68%) sudah memiliki tempat tinggal, sedangkan sebanyak 5 responden (10%) dengan status tempat tinggal sewa atau mengontrak dan sebanyak 12 responden (24 %) masih ikut dengan orang tua. Untuk responden yang bekerja di sektor non industri, sebanyak 28 responden (56%) telah memiliki rumah sendiri, sebanyak 8 responden (16%) dengan status tempat tinggal sewa atau mengontrak dan sebanyak 14 responden (28%) masih tinggal dengan orang tua.

B. Jenis Dinding Terlalu Tempat Tinggal

Dalam menilai kualitas tempat tinggal, sifat dan bahan yang digunakan dalam membangun rumah merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam melihat kelayakan sebuah tempat tinggal. Akan tetapi, dalam hal ini indikator yang digunakan adalah jenis bahan yang digunakan sebagai dinding rumah tersebut. **Lihat gambar 3.8.**

Gambar 3.8
Perbandingan Dinding Tempat Tinggal/Rumah
Penduduk Yang Bekerja Di Sektor Industri Dengan Non Industri



Sumber: Hasil Kuesioner, 2009

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa untuk responden yang bekerja disektor industri sebanyak 47 responden (94%) jenis dinding tempat tinggal yang digunakan adalah tembok Permanen, sebanyak 3 responden (6%) dengan jenis dinding tembok tidaj permanen. Sedangkan untuk jenis dinding tempat tinggal penduduk yang bekerja disektor non industri sebanyak 45 responden atau 90% dengan dinding rumah tembok permanen, sebanyak 5 responden atau 10 % dengan jenis dinding tembok belum permanen. Selain itu, untuk kondisi jenis dinding tempat tinggal penduduk di Kecamatan Cipeundeuy dapat dilihat dari gambar hasil dokumentasi. **Lihat gambar 3.9.**

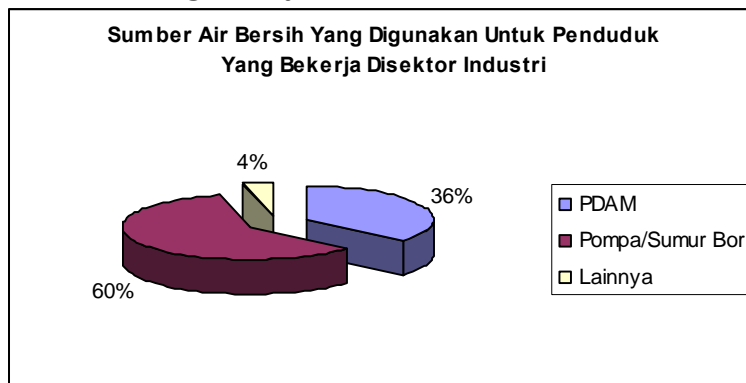
Gambar 3.9
Kondisi Jenis Dinding Tempat Tinggal Penduduk

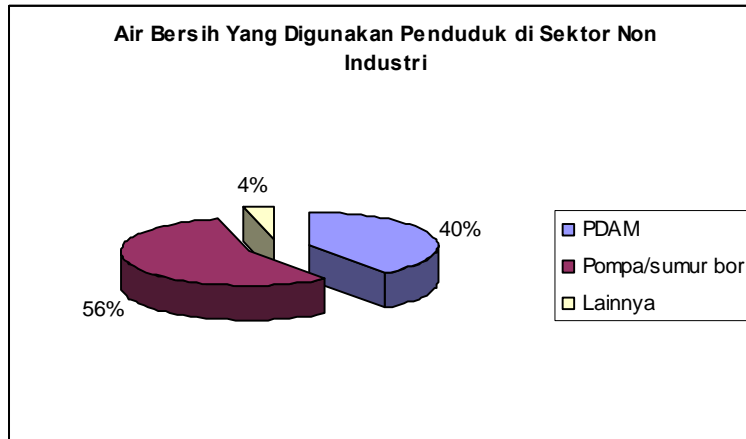


C. Kemampuan Memperoleh Sumber Air Bersih

Bahwa air bersih merupakan salah satu kebutuhan yang perlu diperhatikan oleh setiap penduduk, oleh karena itu tingkat kesejahteraan penduduk juga dapat ditinjau dari kemampuan setiap rumah tangga dalam memperoleh air bersih yang layak untuk dikonsumsi oleh setiap penduduk. Untuk lebih jelasnya **lihat gambar 3.10**.

Gambar 3.10
Perbandingan Sumber Air Bersih Yang Digunakan Penduduk Yang Bekerja Disektor Industri Dan Non Industri





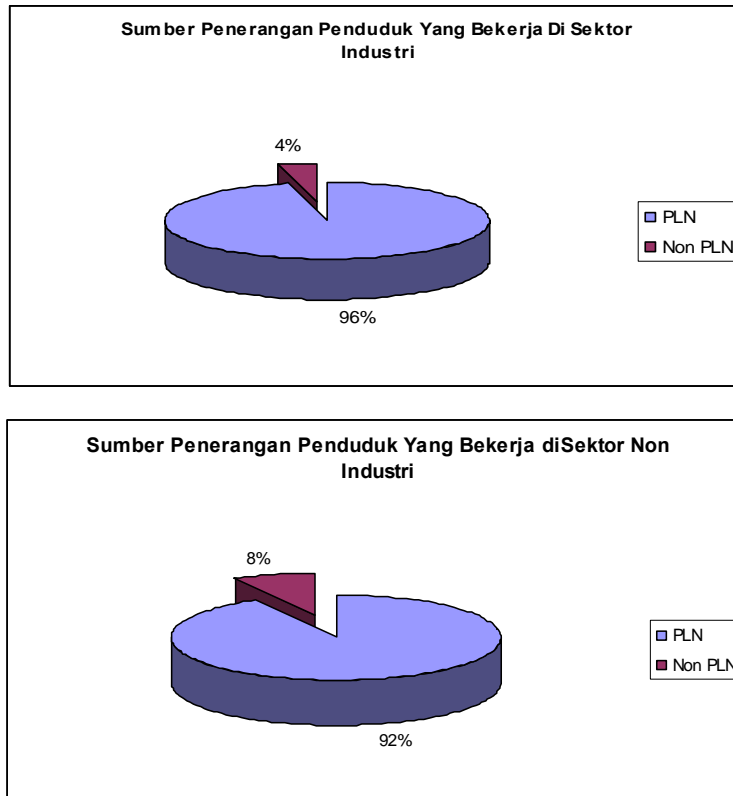
Sumber : Hasil Kuesioner, 2009

Dari gambar tersebut, dapat diketahui bahwa sumber air bersih yang digunakan penduduk yang bekerja disektor industri sebanyak 30 responden atau 60% sumber air bersih berasal dari Pompa/Sumur bor, sebanyak 18 responden atau 36% menggunakan sumber air bersih dari PDAM serta sebanyak 2 responden (4%) menggunakan sumber air bersih lainnya. Sedangkan untuk sumber air bersih yang digunakan penduduk sektor non industri sebanyak 28 responden atau 56% sumber air bersih berasal dari pompa/sumur bor, sebanyak 20 responden atau 40% menggunakan sumber air bersih PDAM dan sebanyak 2 responden atau 4 % meggunakan sumber air bersih lainnya.

D. Kemampuan Memperoleh Sumber Penerangan

Dalam mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk, sumber penerangan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan, oleh karena itu, hal ini dapat diketahui dari kemampuan penduduk dalam memperoleh penerangan. **Lihat gambar 3.11**

Gambar 3.11
Perbandingan Sumber Penerangan Yang Digunakan Oleh Penduduk Yang Bekerja Di sektor Industri Dengan Sektor Non Industri



Sumber : Analisis 2009

Dimana untuk sumber penerangan yang diperoleh penduduk yang bekerja disektor industri sebanyak 48 responden atau 96% sumber penerangan/listrik berasal dari PLN dan hanya sebanyak 2 responden atau 4% sumber penerangan berasal dari non PLN. Sedangkan untuk penduduk yang bekerja disektor non industri sumber penerangan yang diperoleh sebanyak 46 responden atau 92% berasal dari PLN dan hanya sebanyak 6 responden atau 8% yang menggunakan sumber penerangan dari non PLN (lampu tempel, patromak). Adapun kondisi jaringan listrik PLN di wilayah Kecamatan Cipeundeuy dapat dilihat dari gambar hasil dokumentasi berikut, **Lihat gambar 3.12.**

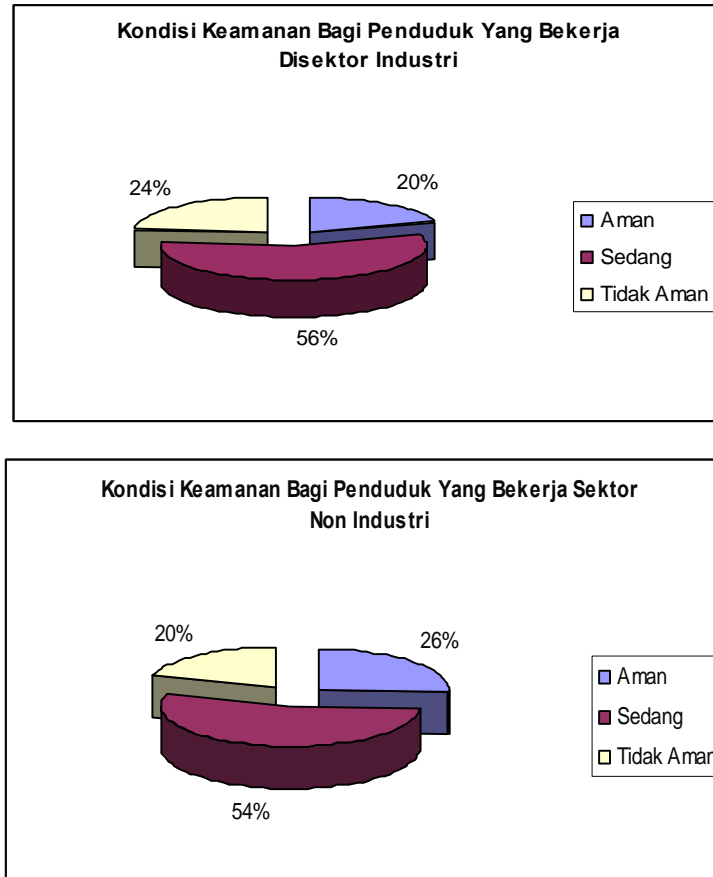
Gambar 3.12
Kondisi Sumber Penerangan/Listrik
Di Kecamatan Cipeundeuy



3.3.4 Indikator Kemudahan Mendapatkan Pelayanan Keamanan Lingkungan

Salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk yaitu adanya rasa aman dari segala gangguan atau tindakan kejahatan yang dapat merugikan dan mengancam keselamatan setiap orang. Dalam hal ini akan ditinjau perbandingan antara kondisi keamanan yang dirasakan oleh penduduk yang bekerja disektor industri dengan penduduk yang bekerja disektor non industri. **Lihat gambar 3.13.**

Gambar 3.13
Perbandingan Rasa Aman Yang Dirasakan
Penduduk Yang Bekerja Disektor Industri Dengan Sektor Non Industri



Sumber : Hasil Kuesioner, 2009

Dari gambar tersebut dapat diketahui, bahwa kondisi rasa aman yang dirasakan oleh penduduk yang bekerja disektor industri lebih besar, yang mana sebanyak 10 responden (26%) mengatakan kondisinya aman, sebanyak 28 responden (56%) mengatakan kondisi keamanannya adalah sedang, dan 12 responden (24%) mengatakan kondisinya tidak aman. Dibandingkan untuk penduduk yang bekerja disektor non industri sebanyak 27 responden (54%) mengatakan kondisi keamanannya sedang, sebanyak 13 responden (26%) mengatakan kondisinya aman dan sebanyak 10 responden (20%) mengatakan tidak aman. Selain itu, kondisi keamanan lingkungan tempat tinggal dapat dilihat dari ketersediaan sarana keamanan lingkungan. **Lihat gambar 3.14.**

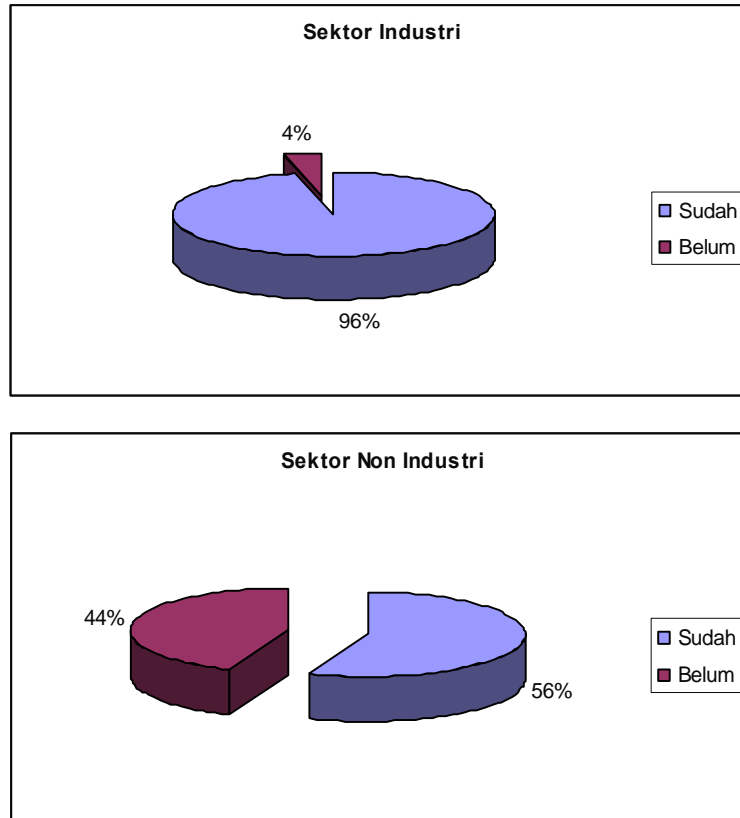
Gambar 3.14
Kondisi Sarana Keamanan Lingkungan Tempat Tinggal



3.3.5 Indikator Kemampuan Memperoleh Pelayanan Kesehatan

Kesehatan merupakan indikator kesejahteraan masyarakat karena semakin sejahtera penduduk, maka tingkat kesehatannya semakin baik. Salah satunya adalah ketersediaan sarana kesehatan, seperti : puskesmas, balai kesehatan, balai bersalin (ibu dan anak), dan lain-lain. Adapun dalam hal ini akan dilihat perbandingan dan hubungan atau pengaruhnya penduduk yang bekerja disektor industri dan penduduk sektor non industri terhadap pelayanan sarana kesehatan yang sudah ada di wilayah tersebut. **Lihat Gambar 3.15**

Gambar 3.15
Perbandingan Kemampuan Memperoleh Pelayanan Kesehatan Bagi
Penduduk Yang Bekerja Di Sektor Industri dan Sektor Non Industri



Sumber : Hasil Kuesioner, 2009

Dari gambar tersebut dapat diketahui, bahwa adanya beberapa sarana kesehatan di wilayah ini sangat dirasakan baik oleh penduduk yang bekerja di sektor industri maupun penduduk non sektor industri, yang mana ditinjau dari penduduk sektor industri sebanyak 48 responden (96 %) sudah terlayani sarana kesehatan dan 2 responden (4 %) masih belum terlayani sarana kesehatan. Dibandingkan dengan penduduk yang bekerja di sektor non industri sebanyak 28 responden (56 %) sudah dapat terlayani sarana kesehatan dan 22 responden (44%) masih belum terlayani kesehatan.

Adapun klasifikasi dari pendapat beberapa responden terhadap pelayanan sarana kesehatan disekitar wilayah industri Kecamatan Cipeundeuy. **Lihat tabel 3.12.**

Tabel 3.12
Klasifikasi Kemampuan Memperoleh Pelayanan Sarana Kesehatan
Menurut Responden Di Wilayah Kecamatan Cipeundeuy

Klasifikasi Jawaban Responden	Tolak Ukur Jawaban Responden
Sudah Terlayani	- Dekat dengan permukiman penduduk - Lokasi sarana kesehatan yang mudah dijangkau dengan moda angkutan umum.
Belum Terlayani	- Jauh dari permukiman penduduk. - Lokasi sarana kesehatan yang sulit dijangkau dengan moda angkutan umum.

Sumber : Hasil pengolahan kuesioner

Dari beberapa hasil reponden, juga terdapat gambaran kondisi sarana pelayanan kesehatan penduduk di sekitar Zona Industri Kecamatan Cipeundeuy. **Lihat gambar 3.16.**

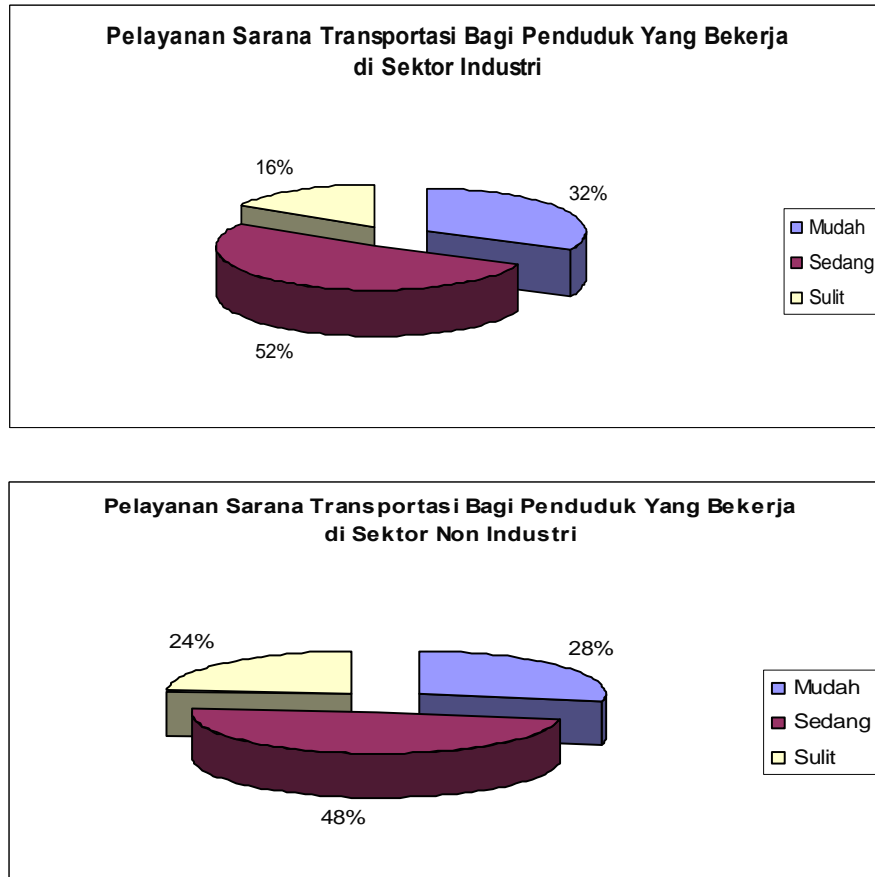
Gambar 3.16
Kondisi Sarana Kesehatan di Zona Industri
Kecamatan Cipeundeuy



3.3.6 Indikator Kemampuan Memanfaatkan Pelayanan Angkutan Umum (Moda Transportasi)

Kemudahan mendapatkan sarana transportasi berupa angkutan umum baik untuk penduduk yang bekerja disektor industri maupun penduduk yang bekerja disektor non industri merupakan hal yang perlu diperhatikan, dalam mendukung peningkatan kesejahteraan penduduk. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden yang bekerja sektor industri maupun non industri, maka dapat dilihat pada gambar berikut. **Lihat gambar 3.17.**

Gambar 3.17
Perbandingan Kondisi Kemampuan Penduduk
Dalam Memanfaatkan Angkutan Umum



Sumber : Hasil Kuesioner, 2009

Dari gambar tersebut, dapat diketahui bahwa keberadaan sarana transportasi di wilayah Kecamatan Cipeundeuy sangat diperlukan. Hal ini dapat diketahui dari responden beberapa penduduk baik yang bekerja disektor industri maupun non industri, yang mana untuk penduduk yang bekerja disektor industri dalam memperoleh sarana angkutan umum sebanyak 16 responden atau sebesar 32 % mengatakan mudah dalam mendapatkan sarana angkutan umum, sebanyak 26 responden atau sebesar 52% mengatakan sedang dalam mendapatkan sarana angkutan umum dan sebesar 8 responden atau sebesar 18% mengatakan sulit dalam mendapatkan sarana angkutan umum. Sedangkan untuk penduduk yang bekerja disektor non industri sebanyak 14

responden atau 28% mengatakan mudah dalam mendapatkan sarana angkutan umum, sebanyak 24 responden atau sebesar 48% mengatakan sedang untuk mendapatkan sarana angkutan umum dan sebanyak 12 responden atau sebesar 24% mengatakan sulit dalam memperoleh sarana angkutan umum.

Adapun klasifikasi dari pendapat responden terhadap kemudahan untuk mendapatkan sarana angkutan umum disekitar kegiatan industri Kecamatan Industri.

Lihat tabel 3.13

Tabel 3.13

Klasifikasi Kemampuan Penduduk Dalam Memanfaatkan Angkutan Umum Menurut Responden Kecamatan Cipeundeuy

Klasifikasi Jawaban Responden	Tolak Ukur Jawaban Responden
Mudah	- Lokasi permukiman dilalui oleh trayek angkutan umum atau angkutan karyawan - Operasi angkutan umum 24 jam. - Biaya murah
Sedang	- Lokasi permukiman dilalui oleh trayek angkutan umum atau angkutan karyawan - Operasi angkutan umum 24 jam.
Sulit	- Lokasi permukiman penduduk tidak dilalui oleh angkutan umum. - Biaya mahal - Operasi angkutan terbatas

Sumber : Data hasil pengolahan kuesioner.

Dari beberapa klasifikasi pendapat tentang kemudahan mendapatkan sarana angkutan umum, selain itu juga dapat dilihat dari kondisi sarana angkutan umum yang ada di Kecamatan Cipeundeuy. **Lihat gambar 3.18**

Gambar 3.18
Kondisi Sarana Angkutan Umum
Di Kecamatan Cipeundeuy

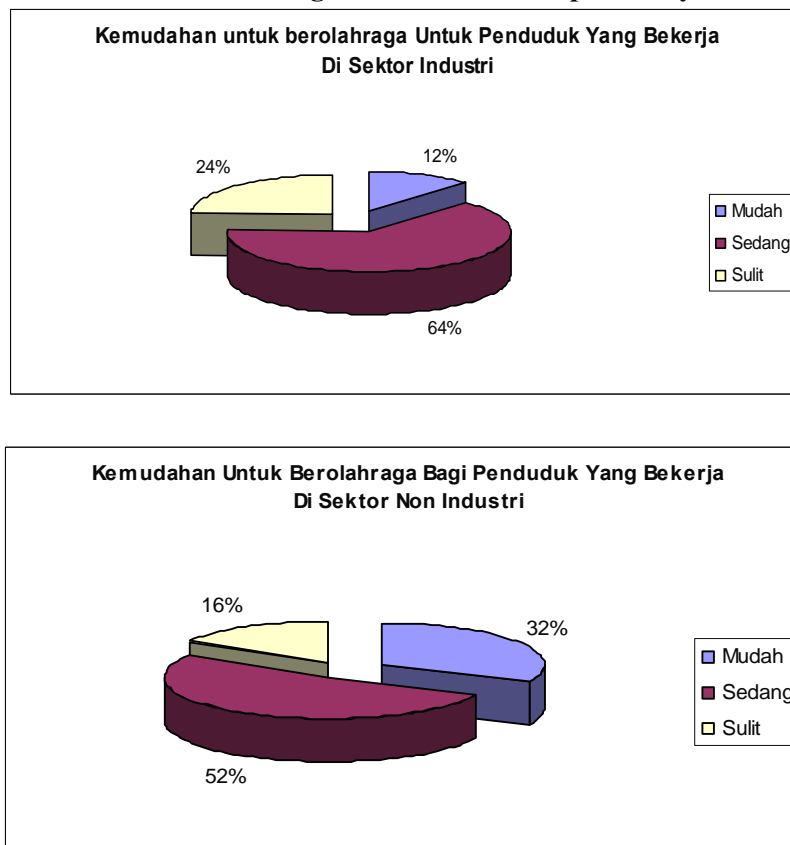


Kondisi Angkutan Umum di Kecamatan Cipeundeuy
Sebagai Moda Transportasi Bagi Penduduk Yang Bekerja
di Sektor Industri atau Non Industri

3.3.7 Indikator Kemampuan Memanfaatkan Sarana Olahraga

Dengan tersedianya sarana olah raga di sekitar lingkungan penduduk di Kecamatan Cipeundeuy, diharapkan baik penduduk yang bekerja disektor industri maupun non industri dapat memanfaatkan sarana olahraga yang ada dilingkungan sekitar, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan penduduk diwilayah tersebut. Berdasrkan hasil penyebaran kuesioner kepada penduduk yang bekerja disektor industri maupun penduduk disektor non industri terhadap salah satu indikator kesejahteraan, yaitu dalam memanfaatkan sarana olahraga yang ada diKecamatan Cipeundeuy. **Lihat Gambar 3.19.**

Gambar 3.19
Perbandingan Kondisi Kemampuan Penduduk Dalam Memanfaatkan Sarana Olahraga Di Kecamatan Cipeundeuy



Sumber : Hasil Kuesioner 2009

Dari gambar tersebut, dapat diketahui bahwa untuk penduduk yang bekerja disektor industri sebanyak 6 responden atau sebesar 12% mengatakan mudah, sebanyak 32 responden atau sebesar 64% mengatakan sedang dan sebanyak 12 responden atau sebesar 24 % masih sulit dalam memanfaatkan sarana olahraga yang ada. Sedangkan untuk penduduk yang bekerja disektor non industri sebanyak 16 responden atau sebesar 32% mengatakan mudah, sebanyak 26 responden atau sebesar 52% mengatakan sedang dan sebanyak 8 responden atau sebesar 16 % mengatakan sulit dalam memanfaatkan sarana olah raga yang ada. Selain itu, untuk klasifikasi dari pendapat beberapa responden dapat dilihat pada **tabel 3.14**.

Tabel 3.14
Klasifikasi Kemampuan Penduduk Dalam Memanfaatkan Sarana Olahraga
Menurut Responden Di Wilayah Kecamatan Cipeundeuy

Klasifikasi Jawaban Responden	Tolak Ukur
Mudah	<ul style="list-style-type: none"> - Dekat dengan permukiman penduduk - Mudah dijangkau dengan transportasi - Jenis sarana olahraga lengkap - Biaya Murah
Sedang	<ul style="list-style-type: none"> - Dekat dengan permukiman penduduk. - Mudah dijangkau dengan transportasi
Sulit	<ul style="list-style-type: none"> - Jauh dengan permukiman penduduk. - Sulit dijangkau dengan transportasi - Jenis sarana olah raga tidak lengkap - Biaya mahal.

Sumber: Hasil pengolahan kuesioner